

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar, Dahlan dan Asdar Muis RMS. 2004. *Inco Mengalir Di Tengah Gejolak Pertambangan*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Afala, La Ode Macdani. 2019. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal (Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal)*. Malang: UB Press.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik, Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Amady, M. Rawa El. 2021. *Manajemen Konflik Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resources Center.
- Bernstein, Henry. 2019. *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria (Edisi Revisi)*. Terjemahan: Dian Yanuardy, dkk. Yogyakarta: Insist Press.
- Galudra, Gamma, dkk. 2013. *RATA: Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hall, Derek, dkk. 2020. *Kuasa Ekslusi: Dilema Pertanahan Di Asia Tenggara*. Terjemahan: Darmawanto Simaepa dan Achmad Choirudin. Yogyakarta: Insist Press.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi. Jakarta: Djamban.
- _____. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djamban.
- Hayati, Tri. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HS, Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. 2009. *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunika-Universitas Terbuka.

- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, Sawedu. 2017. *Gelombang Perlawanan Di Tepian Danau Matano, Resistensi Masyarakat Sorowako terhadap PT Inco*. Makassar: Penerbit Innawa.
- Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah*. Jakarta: Mandar Maju.
- Pide, Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat: Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2016. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Redi, Ahmad. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robinson, Kathryn M. 1986. *Step Children of Progress, The Political Economy of Development in an Indonesia Mining Town*. Albany: State University of New York Press.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2003. *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*. Makassar: Membumi Publishing.
- Sangaji, Arianto. 2002. *Buruk Inco Rakyat Digusur, Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*. Jakarta: Visimedia.
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sigit, Soetaryo. 1991. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Mining Association.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

- _____, dkk. 2008. *Mediasi Sengketa Tanah. Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Susilo, Joko dan Adi Prathomo. 2004. *Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia (Kumpulan Tulisa S. Sigit, 1967-2004)*. Jakarta: Yayasan Minergy Informasi Indonesia.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarief, Elza. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tarigan, Andi. 2018. *Tumpuan Keadilan Rawls, Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tyson, Adam D. 2010. *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia, The Politics of Becoming Indigeneous*. UK: Routledge Tylor&Francis Group.
- Vollenhoven, Cornelis Van. 1923. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Terjemahan: Soewargono. 2013. Yogyakarta: STPN Press.
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setera Press
- Zakaria, R.Yando. 2018. *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*. Bandung: Agrarian Resources Center.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksihinggaan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. JURNAL

Abrar Saleng. 2000. Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah Dalam Kontrak Karya Pertambangan. Buletin Mimbar Hukum. Vol.X, No.36.

Yance Arizona. Juli 2009. Hak Ulayat: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia. Jurnal Konstitusi. Vol. 6, Edisi 2.

Farida Patittingi. 2012. Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol.20, No. 3.

Mahrita Aprilya Lakburlawal. 2016. Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan Hak Guna Usaha. ADHAPER- Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2016.

D. LAPORAN

Pawennari Hijjang, MA, dkk. 2020. Laporan Final Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Konsesi PT Vale Kabupaten Luwu Timur. Makassar: Unhas Press.

Abdul Rahman Nur. 2016. Konflik Agraria Komunitas Adat Karunsi'e dengan PT Vale Indonesia Tbk Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam Eko Cahyono, dkk., Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM RI.

----- 2014. Kampung Dongi, Potret Penerapan Kebijakan Negara yang Mengakibatkan Penderitaan Masyarakat Adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

E. INTERNET

<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020/>

<https://www.kemenkeu.go.id/media/17432/apbn-kita-2020/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150914191532-78-78703/kisah-inflasi-650-persen-dan-cerutu-ali-wardhana/>

<https://pushep.or.id/sejarah-pengaturan-pertambangan-minerba-dan-perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara-pkp2b/>

<http://www.suarapembaruan.com/news/2003/09/17/masyarakat-karunsi'e-dongi-dari-kahar-muzakkar-hingga-nikel/>

<https://miningwatch.ca/blog/2007/2/2/community-leaders-from-indonesia-guatemala-new-caledonia-and-canada-discuss-struggles-against-inco/>

<https://ejatlas.org/karunsi'e-dongi-poeple-and -vale-mine-in-sorowako-sulawesi-indonesia/>

<https://jatam.org/komnasham-desak-perusahaan -tambang-pt-vale-menyambung-kembali-listrik-warga-yangg-diputus-sepihak-selama-64-hari/>

<https://makassar.tribunnews.com/bupati-luwu-timur-keluarkan-hak-diskresis-selesaikan-kisruh-vale-dan-warga-dongi/>

<https://warta.luwutimurkab.go.id/lewat-hak-diskresi-husler-tetapkan-bumper-sorowako-kawasan-pemukiman-terbatas/>

<https://ujungpandangpos/diskresi-jurus-pamungkas-husler-selesaikan-permasalahan-warga-dongi-di-bumper/>

<https://beritakotamakassar.com/berita/2020/04/08/husler-gunakan-hak-diskresi/>

<https://timur-online/gunakan-hak-diskresinya-bupati-lutim-tetapkan-bumper-sorowako-jadi-kawasan-permukiman/>

<https://www.ifc.org/policies-standards/performance-standard-5.>